

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan variabel implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan kondisi ekonomi sosial politik. Setelah dilakukan analisis terkait implementasi kebijakan KIS ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat enam indikator utama dalam menganalisis tingkat keberhasilan suatu kebijakan, begitupun juga untuk mengukur kegagalan suatu kebijakan dalam proses implimentasinya yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari hasil penelitian penulis, Ukuran dan Tujuan dalam kebijakan KIS di Kecamatan Babelan sudah memiliki landasan yang kuat. Ukuran dan Tujuan Kebijaka KIS mengacu pada dasar kebijakan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden no.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang bertujuan yaitu mewujudkan masyarakat prasejahtera di Indonesia

merasakan fasilitas kesehatan secara gratis. Pada bagian ini Pegawai TKSK Kecamatan Babelan sudah cukup melaksanakan standar dan sasaran kebijakan dengan baik. Namun dalam implimentasinya terdapat beberapa kendala dari masyarakat yang masih ada yang belum melengkapi dokumen administrasinya, sehingga diperlukan dorongan dari elemen lain, misalnya desa, keluarahan hingga tingkat rt atau rw untuk meningkatkan implimentasi kebijakan KIS tersebut kepada masyarakat, di samping itu proses pengadaan yang juga tidak cepat.

2. Sumber Daya

Pada bagian ini sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Babelan dinilai belum begitu maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Babelan memang sudah mencukupi ada pegawai TKSK maupun PSM yang dapat membantu masyarakat dalam membutuhkan bantuannya, agar masyarakat tidak kebingungan tapi masih banyak nya masyarakat yang belum merasakan fasilitas kesehatan ini karena adanya proses pembuatan yang cukup rumit saat membuat KIS di Kecamatan Babelan.

3. Komunikasi antar Organisasi

Temuan penulis di lapangan menyebutkan bahwa adanya koordinasi yang cukup baik, dalam hal komunikasi dari Dinas Kesehatan, melalui TKSK maupun PSM yang diberikan tugas untuk

menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun diketahui juga bahwa proses alur komunikasi dari elemen yang lain belum berjalan maksimal, akibatnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum membuat KIS dan hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan KIS di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada karakteristik agen pelaksana Kecamatan Babelan bahwa TKSK sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan informasi mengenai KIS kepada masyarakat melalui sosialisasi, adapun secara jalur struktural sudah dijalankan dengan baik bahkan tingkat RT atau RW dan perangkat agen pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun di sisi lain dari pihak masyarakat juga belum semuanya tersadarkan tentang pentingnya dan manfaat dari kebijakan KIS tersebut. Sehingga perlu ditingkatkan informasi dan sosialisasi lagi, serta perbaikan sistem yang menitikberatkan pada pelayanan masyarakat secara mudah.

5. Disposisi Pelaksana

Pengetahuan serta pemahaman TKSK dan PSM terkait prosedur pelaksanaan kebijakan KIS sudah mengetahui dengan baik dan dalam hal pengetahuan serta pemahaman kebijakan TKSK dan PSM

juga sudah memahami dengan baik. , tapi terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu elemen TKSK tidak dilibatkan dalam proses pendataan, mereka hanya sebagai relawan penyampai informasi. Dengan demikian, pada indikator ini terdapat hal yang tidak dipenuhi dan akan berpengaruh pada proses keberhasilan implimentasi kebijakan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Prinsip dari adanya kebijakan KIS ini untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk dapat memenuhi haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa menggunakan biaya. Dalam temuan penulis pada indikator ini, kurangnya sosialisasi dari pelaksana. kemudian ditambah kendala-kendala administrasi dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implimentasi program KIS di Kecamatan Babelan.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa implimentasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi belum terlaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan sesuai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat sebagai berikut:

a. Saran Praktis

1. Pihak petugas yang dikhususkan untuk melaksanakan penjangkauan dan sosialisasi dari program Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus lebih teliti dalam proses pendataan dan pemberkasan dalam menentukan kelayakan penerima Kartu Indonesia Sehat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur itu.
2. Pihak petugas harus bisa menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang membutuhkan program ini, melalui sosialisasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau dengan kata lain tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab sebagai petugas sosialisasi, namun esensi dari program tersebut harus diketahui sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi masyarakat yang kebingungan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.
3. Pemangkasan prosedur seperti ini perlu dilakukan, khususnya mengenai persyaratan untuk mendapatkan KIS ini, karena temuan di lapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak mendapatkan

KIS karena persyaratannya tidak memenuhi syarat, misalnya KTP dan KK yang tidak valid dan lain sebagainya.

b. Saran Teoritis

1. Disarankan kepada hasil penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Disarankan kepada hasil penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

